

### **BAB III**

#### **KESADARAN PEREMPUAN DI MANGKUNEGARAN AKAN PENTINGNYA PENDIDIKAN**

##### **A. Kesadaran Perempuan Memperoleh Pendidikan**

Kebangkitan merupakan tanda yang memberi ciri khas pada kodrat manusia. Seseorang dapat dikatakan bangkit bila ia mampu memilih apa yang dikehendaki dan ingin dikerjakannya. Kebangkitan disadari sebagai kekuatan yang secara kualitatif berbeda dengan mekanisme biologis. Lebih jauh lagi kebangkitan dianggap sebagai hak dari setiap manusia yang lahir di dunia.<sup>1</sup> Dapat dikatakan bahwa manusia belum sungguh-sungguh manusia jika tanpa kebebasan. Sejarah pergerakan telah mencatat betapa gigihnya manusia khususnya kaum perempuan memperjuangkan kebangkitan dalam mendapatkan pendidikan.

Bagi kaum perempuan, kebangkitan berarti hilangnya hambatan-hambatan untuk mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan jiwannya. Mendapat pendidikan sekolah dan bekerja di luar rumah tangga dalam bidang-bidang yang sesuai dengan bakatnya. Cara hidup demikian dianggap lebih bermanfaat dan jauh lebih sesuai dengan cita-cita perikemanusiaan dan perikeadilan. Daripada bertumpu pada sistem feodal dan sistem tradisional yang membatasi ruang lingkup hidup perempuan.

Pendidikan tidak hanya sangat membantu menghilangkan anggapan bahwa perempuan lebih rendah, melainkan juga mampu menghilangkan rendahnya status

---

<sup>1</sup>Maria Ulfah Subadio, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978, hlm. 17.

mereka. Pendidikan memunculkan kesadaran bahwa manusia dilahirkan dan diciptakan sederajat.

Permulaan abad ke-20 makin banyak perempuan yang mendapat kesempatan memperoleh pendidikan. Sebagian kalangan menentang perubahan ini, tetapi keyakinan bahwa kaum perempuan harus mendapatkan pendidikan dan kedudukan yang lebih baik dalam masyarakat makin meluas. Pandangan ini pun mendapat dukungan dari berbagai anggota golongan yang berpengaruh. Dukungan terhadap usaha memajukan perempuan dijumpai di mana-mana. Usaha perjuangan dalam memperoleh pendidikan ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Kartini.

Sebelum R.A. Kartini memajukan usahanya dalam pendidikan kaum perempuan, di kalangan bangsawan sudah terlebih dulu gencar dalam usaha memajukan perempuan tapi hanya dalam lingkungan kecil. Mereka berusaha memperoleh pendidikan dari barat. Oleh pelopor-pelopori perempuan kita pada waktu itu pendidikanlah yang lebih diutamakan.<sup>2</sup> Pendidikan akan menambah kesadaran dan mengembangkan kemampuan yang dapat berguna untuk kemajuan masyarakat. Bukan lagi pendidikan yang dilakukan dalam keluarga saja mengenai sopan-santun, sikap hidup, dan kerumahtangaan, melainkan pendidikan sekolah dengan pelajaran yang lebih luas.

Usaha pendidikan perempuan yang dipelopori dan dikembangkan oleh Kartini, secara esensial merupakan usaha membantu kaum perempuan untuk

---

<sup>2</sup>KOWANI, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984, hlm. 265.

berani mengambil suatu keputusan.<sup>3</sup> Besar kecilnya seseorang mengambil keputusannya sendiri menentukan secara langsung derajat pendidikannya. Usaha pendidikan perempuan yang dikembangkan Kartini tidak hanya berdasarkan pembangkitan kebebasan membaca, menulis dan belajar secara teratur.

Pandangan Kartini beranggapan bahwa pendidikan akan mengakibatkan perempuan mendapat keahlian yang membuatnya mampu untuk berdiri sendiri. Sekalipun memang zaman sekarang sering dibanggakan adanya perempuan-perempuan yang mengalami pendidikan tinggi dan juga yang menempati jabatan berarti. Diseluruh dunia perjuangan perempuan untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dengan laki-laki sampai sekarang masih dirasa perlu, bahkan di negara yang sudah majupun kesempatan mendapat pendidikan yang sama ternyata tak seluruhnya diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan, apalagi kesempatan bekerja dan memperoleh hak yang sama.<sup>4</sup>

Perempuan yang sadar bahwa kemungkinan untuk mengubah keadaan ini barangkali hanya kecil jumlahnya, apalagi mereka yang benar-benar berusaha mengadakan perubahan. Pendidikan bagi kaum perempuan telah menjadi keharusan yang bersifat Internasional, karena kemajuan yang merupakan kebutuhan mendesak ini menciptakan dan sekaligus menuntut jenis perempuan yang baru. Persoalannya bukanlah bagaimana menyediakan dasar-dasar pendidikan atas dasar perikemanusiaan semata. Kaum perempuan harus diberi segala persyaratan untuk ikut ambil bagian dalam membangun dunia ini.

---

<sup>3</sup>Hatta, *Pendidikan di Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1976, hlm. 23.

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1981, hlm. 55.

Mendesaknya kebutuhan ini berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh keadilan dan berkenaan dengan pentingnya orang perorangan, dan semua itu menyebabkan ketidakberlakuannya anggapan bahwa perempuan lebih rendah kedudukannya. Perempuan juga manusia seperti laki-laki, ia pun patut memperkembangkan kemampuannya, untuk memilih jalan hidup yang hendak ditempuhnya serta melaksanakan kegiatan-kegiatan dan memegang segala tanggungjawab yang akan ikut membantu kemuliaan manusia<sup>5</sup>. Seperti halnya kerja atau kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi, pendidikan adalah hak seluruh umat manusia, untuk laki-laki maupun perempuan dan bukan hanya untuk salah satu dari kedua jenis itu.

Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan sehingga keduanya dapat maju bersama, seiring jalan sebagai mitra, bukan sebagai atasan-bawahan. Kartini merupakan salah satu tokoh yang mengupayakan pendidikan bagi kaum perempuan sehingga semangat Kartini menjadi hal yang fundamental bagi kemajuan pendidikan kaum perempuan. Usaha pendidikan perempuan yang dipelopori dan dikembangkan oleh Kartini merupakan usaha membantu kaum perempuan untuk dapat mengambil keputusan sendiri dan menentukan nasib sendiri.

Kartini berpandangan bahwa pendidikan akan membuat perempuan memperoleh pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang membuatnya mampu berdiri sendiri dan menentukan nasib sendiri. Kartini juga membahas bermacam-macam masalah yang menyangkut nasib dan hidup manusia. Dalam hal

---

<sup>5</sup>Nur Aini, *Melahirkan Kembali Gerakan Feminisme Revolusioner; Kilas Balik Tentang Gerwani*, Jakarta : Anggota KPP-PRD, hlm. 200.

memajukan kesusilaan manusia, perempuan dianggap besar sekali pengaruhnya. Kartini setuju akan perkataan Mrs. Abendanon bahwa: “perempuan itu soko guru peradaban.” Bukankah dari perempuan itu manusia pertama kali menerima pendidikannya, di pangkuan seorang ibu, anak belajar merasa dan berpikir serta bertutur kata. Pendidikan yang mendasar itu besar sekali pengaruhnya bagi kehidupan manusia di kemudian harinya. Melalui seorang ibulah yang menjadi pusat kehidupan rumahtangga dan kepada Ibulah dipertanggungjawabkan kewajiban pendidikan yang berat guna membentuk sikap dan perilakunya.

Kaum perempuan adalah pengembang peradaban, maka dari itu mereka harus mendapatkan pendidikan supaya kelak dapat mendidik anak-anaknya dengan baik. Seperti telah dijelaskan di atas, Kartini beranggapan bahwa suatu pendidikan yang ditujukan tidak hanya untuk mengasah otak saja. Pendidikan budi pekerti dan pembinaan watak juga sangat penting, bahkan diutamakan.

Bila Perempuan tidak mendapat pendidikan, bahaya akan datang dalam lingkungan masyarakat, tetapi jika pendidikan yang diberikan atas mereka keliru maka maka tidak sedikit pula malapetaka yang akan dilimpahkan bagi kaum perempuan haruslah disertai berbagai macam kebijaksanaan, tidak boleh sembarangan.<sup>6</sup>

Perempuan yang sadar bahwa kemungkinan untuk mengubah keadaan ini barangkali hanya kecil jumlahnya, apalagi mereka yang benar-benar berusaha mengadakan perubahan. Pendidikan bagi kaum perempuan telah menjadi keharusan yang bersifat menyeluruh, karena kemajuan yang merupakan

---

<sup>6</sup> K.H. Moenawar Cholil, *Nilai Wanita* Jakarta: Ramadhan, 1954, hlm. 115.

kebutuhan mendesak ini menciptakan dan sekaligus menuntut jenis perempuan yang baru. Persoalannya bukanlah bagaimana menyediakan dasar-dasar pendidikan atas dasar perikemanusiaan semata. Kaum perempuan harus diberi segala persyaratan untuk ikut ambil bagian dalam membangun dunia ini.

Mendesaknya kebutuhan ini dengan demikian berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh keadilan dan berkenaan dengan pentingnya orang perorangan, dan semua itu menyebabkan ketidakberlakuannya anggapan bahwa perempuan lebih rendah kedudukannya. Perempuan juga manusia seperti laki-laki, ia pun patut memperkembangkan kemampuannya, untuk memilih jalan hidup yang hendak ditempuhnya serta melaksanakan kegiatan-kegiatan dan memegang segala tanggungjawab yang akan ikut membantu kemuliaan manusia.<sup>7</sup> Seperti halnya kerja atau kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi, pendidikan adalah hak seluruh umat manusia, untuk laki-laki maupun perempuan dan bukan hanya untuk salah satu dari kedua jenis itu.

Pokok-pokok pandangan Kartini tentang pendidikan,<sup>8</sup> dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, kunci kemajuan bangsa terletak pada pendidikan. Bangsa yang maju adalah bangsa yang pandai, berwawasan luas, dan memiliki ilmu pengetahuan serta teknologi yang diperoleh melalui proses pendidikan. Oleh karenanya, seluruh anak bangsa harus dapat menerima pendidikan.

---

<sup>7</sup>Nur Aini, *Melahirkan Kembali Gerakan Feminisme Revolusioner: Kilas Balik Tentang Gerwani*, Jakarta: Anggota KPP-PRD, hlm. 200.

<sup>8</sup> Ki Soeratman, *Kartini dan Pendidikan: Satu Abad Kartini*, Jakarta: Sinar Harapan, 1979, hlm. 39.

*Kedua*, pendidikan sifatnya harus non-diskriminatif dan harus diberikan kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, keturunan, kedudukan sosial, dan lain-lain. Pendidikan harus memberi kesempatan kepada siapa saja, dari kalangan manapun untuk dapat mengenyam pendidikan dan memperoleh kesempatan belajar. Dalam pendidikan harus diajarkan sikap non-diskriminatif, menghargai perbedaan, dan memandang seluruh umat manusia sederajat.

*Ketiga*, pendidikan untuk rakyat yang bersifat nasional meliputi pendidikan sekolah (formal) dan juga pendidikan keluarga dan luar sekolah (non-formal). Pendidikan harus dilakukan di mana saja, baik melalui lembaga formal pendidikan maupun non-formal. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat, setiap orang di mana pun memiliki hak untuk belajar mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan sarana pendidikan yang ada.

*Keempat*, selain memberikan pengetahuan dan keterampilan hendaknya lebih mengutamakan pembentukan watak dan kepribadian anak-anak. Pendidikan karakter merupakan hal yang utama dalam proses pendidikan. Karakter dan kepribadian lah yang menentukan kualitas sebuah bangsa. Dengan pendidikan karakter dan kepribadian yang baik, sebuah bangsa akan lebih mudah mencapai kemajuan dan keberhasilan.

*Kelima*, memperhatikan kedudukan perempuan pada zamannya yang sangat tertinggal jauh dalam berbagai bidang dibandingkan kaum laki-laki, maka Kartini memandang begitu penting dan mendesak untuk secara khusus menyelenggarakan persekolahan bagi kaum perempuan. Perempuan harus

mengenyam pendidikan sebagaimana laki-laki agar perempuan pun dapat berperan penting dalam pendidikan, mandiri, berwawasan luas, dan memiliki keterampilan serta kemampuan untuk mengembangkan diri setara dengan laki-laki.

## **B. Kiprah Kaum Perempuan dalam Pendidikan**

Pada masa pergerakan Indonesia, peran dan eksistensi perempuan masih sangat kurang diperhatikan, bahkan cenderung diabaikan dan disingkirkan. Sampai sekarang pun keberadaan perempuan di berbagai kalangan selalu berada di posisi yang selalu mengundang pertentangan dan bahkan sering kali kaum perempuan dilecehkan secara berlebihan.<sup>9</sup> Perdebatan tentang eksistensi perempuan dari zaman ke zaman selalu menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Sebagian orang bahkan masih memandang perempuan dengan sebelah mata, hingga masih ada anggapan bahwa perempuan tidak berhak mendapatkan apa pun yang dimiliki laki-laki.

Sebagian pandangan yang dianggap buram oleh perempuan pada masa pergerakan nasional, misalnya, perempuan tidak diperbolehkan mendapatkan pendidikan. Hal semacam itu pernah terjadi di Jawa Tengah yang membuat mereka tidak berdaya pada saat itu.<sup>10</sup> Dalam sejarah pergerakan, perempuan dianggap tidak memainkan peran penting dalam kehidupan bermasyarakat

---

<sup>9</sup> Muhammad bin Abdilah Sulaiman, *Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah*, Solo: Hazanah Ilmu, 1994, hlm. 7.

<sup>10</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak-Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001, hlm. 18-19.

sehingga kemajuan pendidikan perempuan dianggap tidak bermanfaat pada masa itu. Selain itu, perempuan juga dipandang sebagai makhluk yang tidak berharga, keberadaannya menjadi bagian dari laki-laki yang haknya ditindas dan dirampas. Hal ini mempengaruhi keberadaan perempuan dalam masyarakat sepanjang masa. Bidang-bidang keahlian tertentu, misalnya, banyak didominasi oleh laki-laki karena perempuan dipandang kurang mampu bahkan kurang cocok memegang keahlian di bidang tertentu karena perbedaan kemampuan yang dimiliki laki-laki dan perempuan berbeda. Demikian pula dengan hak mereka dalam memperoleh pendidikan. Laki-laki dan perempuan dianggap memiliki hak yang tidak sama.

Pandangan ini mulai berubah setelah diterbitkannya kumpulan surat-menyerat Kartini dengan teman-temannya di Eropa oleh Jacques Henri Abendanon (1852-1925), Menteri Kebudayaan, Agama dan Kerajinan Hindia Belanda waktu itu. Beliau datang ke Hindia Belanda pada tahun 1900 dan mengumpulkan serta membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan oleh R.A. Kartini kepada para teman-temannya di Eropa. Buku itu diberi judul *Door Duisternis tot Licht* yang artinya *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada tahun 1911. Buku ini dicetak sebanyak lima kali dan pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat dari R.A. Kartini. Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah.<sup>11</sup>

Perubahan yang dipelopori oleh Kartini ini merupakan puncak perubahan yang hakiki bagi kaum perempuan khususnya. Kesetaraan antara laki-laki dan

---

<sup>11</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern, op.cit.* hlm. 174.

perempuan menunjukkan bahwa perempuan bukanlah parasit yang lemah dalam kehidupan. Perempuan pun mulai berperan aktif sesuai dengan kodratnya dalam kehidupan sosial serta sejajar dengan laki-laki. Artinya perempuan tidaknya hanya menjadi *konco wingking* bagi laki-laki, tetapi sebagian perempuan dapat membuktikan bahwa ia dapat memperoleh sesuatu yang layak dan sejajar dengan laki-laki.

Di lain pihak terdapat anggapan dari masyarakat yang mengatakan bahwa yang berhak mendapatkan ilmu serta pendidikan hanyalah laki-laki, perempuan tidak berhak sama sekali. Fenomena ini masih dapat dijumpai pada masyarakat atau orangtua yang berpandangan bahwa tugas perempuan itu di rumah, merawat anak, melayani suami, dan mengatur rumah tangga. Sedangkan laki-laki dapat memperoleh ilmu pengetahuan dengan pendidikan bahkan sampai ke luar negeri. Di lain pihak, perempuan juga harus memiliki wawasan, pengalaman, dan pengetahuan kerana ia nantinya akan menjadi seorang ibu yang salah satunya berfungsi sebagai pusat pendidikan minimal bagi anak-anaknya.<sup>12</sup>

Karakteristik pendidikan yang telah dijelaskan di atas menjadikan perempuan cukup aktif dan kreatif dalam kegiatan memajukan pendidikan patut diapresiasi kerana seorang perempuan membuktikan bahwa ia bukanlah parasit yang pantas berada di tempat-tempat yang lemah dalam kehidupan.

Seorang perempuan diciptakan dengan keterbatasan-keterbatasan yang cukup mengikat bagi dirinya. Pada dasarnya perempuan juga memiliki kelebihan yang lebih baik dibanding dengan laki-laki, dan itu merupakan hal-hal yang patut

---

<sup>12</sup> Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.

disyukuri oleh para perempuan. Hendaknya perempuan mampu berada diposisi strategis dalam masyarakat, khususnya dibidang pendidikan . tidak hanya berpangku tangan dan pasrah dengan keadaan paling tidak berperan aktif untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam hidup. Dan pada umumnya peran perempuan dalam masyarakat terbatas pada praktek-praktek kebudayaan.<sup>13</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pendidikan merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan, oleh karenanya disini sebagai makhluk hidup yang diberi kemampuan akal yang sempurna hendaknya manusia mendapatkan pendidikan yang layak dalam kehidupan. Banyak masyarakat mengaggap bahwa pendidikan itu hanya untuk laki-laki, karena laki-laki-lah yang akan memimpin keluarga atau masyarakat pada umumnya. Perempuan hanya sebagai “Konco Winking” bagi para laki-laki. Hal ini mengakibatkan para perempuan menjadi tidak mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan keahlian dalam menjalani hidupnya. Beragam pandangan hadir dan berkembang didunia publik tentang perempuan, eksistensi dan perannya seringkali menimbulkan banyak pandangan.

Adanya diskriminasi terkait hak perempuan dalam memperoleh pendidikan tak lantas menjadi sebuah kekuatan bagi perempuan untuk mendapatkan peran yang lebih ataupun setara dengan laki-laki. Masih banyak diskriminasi terhadap perempuan dalam sebuah pendidikan yang menyebabkan lemahnya posisi perempuan akibat rendahnya tingkat pendidikan yang diperoleh. Kuantitas yang berlebih tidak ditunjang dengan kualitas yang dihasilkan. Hal tersebut ditengarahi oleh beberapa hal seperti pembatasan memperoleh pendidikan

---

<sup>13</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, cetakan 3. hlm. 63.

bagi perempuan, kesalahan persepsi masyarakat terkait eksistensi perempuan, minimnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dan lain sebagainya.<sup>14</sup> Disadari atau tidak fenomena tersebut akan berdampak pada eksistensi perempuan dan perannya sebagai individu yang berhak atas pendidikan dan ikut bertanggungjawab kepada negara.

Eksistensi atau keberadaan perempuan dalam sebuah pendidikan sering diartikan sebagai sebuah keegoisan. Beberapa kalangan memandang eksistensi perempuan sebagai sebuah pergolakan atas apa yang tidak menjadi haknya. Keraguan akan ketidakmampuan perempuan dalam ranah publik masih terus diperdebatkan. Akses perempuan dalam dunia pendidikan kurang mendapat perhatian dalam beberapa aspek kehidupan. Pembatasan perempuan terhadap akses kehidupan yang mencakup berbagai kehidupan merupakan pembunuhan secara perlahan dalam mematikan potensi perempuan yang juga berkontribusi dalam memajukan negara.

Pembangunan suatu bangsa yang abadi adalah melalui sistem pendidikan. Pendidikan merupakan pondasi utama dalam suatu perubahan. Pencapaian pendidikan tidak hanya memandang jenis kelamin, suku, agama, maupun golongan. Laki-laki dan perempuan berhak dan berkewajiban untuk terbentuknya tatanan masyarakat dan pembangunan yang adil dan sejahtera. Peningkatan bagi perempuan tentu akan berdampak baik terhadap percepatan pembangunan bangsa. Perempuan mempunyai peran yang besar dalam menyiapkan generasi-generasi yang unggul, bermoral, beriman dan bertaqwa serta berahlak. Semua komponen

---

<sup>14</sup> Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arafah, *op.cit.*, hlm. 46.

tersebut dapat terwujud dalam sebuah paduan peran yang tidak digariskan hanya seorang laki-laki semata, tapi juga perempuan.

### **C. Sekolah-sekolah Perempuan pada Masa Pergerakan Nasional**

Kemajuan dunia pendidikan, khususnya pendidikan bagi kaum perempuan merupakan sebuah kemajuan penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif perempuan pada awal abad ke-20. Kemajuan ini dicapai dengan berbagai lembaga pendidikan khusus untuk perempuan baik yang diselenggarakan oleh organisasi sosial, keagamaan, maupun organisasi politik. Munculnya lembaga-lembaga pendidikan, baik yang dirintis oleh Pemerintah Kolonial Belanda maupun orang-orang Indonesia telah membawa kesadaran berbangsa dan kesadaran kemanusiaan.

#### **1. Sekolah Van Deventer**

Pada tahun 1899, Conrad Theodore van Deventer menerbitkan artikel dengan judul *Een Eereschuld* (Suatu Hutang Kehormatan) dalam majalah Belanda *de Gids*. Isinya menyatakan bahwa negeri Belanda berhutang kepada bangsa Indonesia terhadap semua kekayaan yang telah diperas dan dirampas dari Indonesia.

Hutang ini sebaiknya dibayarkan kembali dengan memberi prioritas utama kepada kepentingan rakyat Indonesia di dalam kebijakan kolonial. Van Deventer merupakan salah satu pelopor politik etis terkemuka yang pada saat itu menjabat sebagai penasihat Pemerintah dan anggota Parlemen Belanda. Melalui artikel tersebut, Van Deventer melihat adanya ketidakadilan Pemerintah Hindia Belanda

dalam melaksanakan pendidikan. Agaknya artikel itu mengusik para penguasa Pemerintah Hindia Belanda menyusul perubahan dalam sistem pendidikan di negeri jajahan. Sebelumnya, pendidikan hanya dimaksudkan untuk ”mencetak” dan menyiapkan manusia yang siap mengabdikan kepada kepentingan penjajah.<sup>15</sup>

Dalam artikelnya itu, Van Deventer menyatakan, melalui tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang pelaksanaannya dipaksakan Gubernur Jenderal Van den Bosch, Belanda meraup hasil panen yang amat berlimpah. Keuntungan yang diperoleh Belanda tahun 1867-1878 saja mencapai 187 juta gulden. Bagi Van Deventer, keuntungan ini merupakan utang Belanda kepada rakyat Indonesia dan harus dikembalikan, entah dalam bentuk apa.

Tidak hanya pendidikan, Van Deventer juga menekankan perlunya pembangunan irigasi dan emigrasi. Kelak ketiga anjuran Van Deventer ini dikenal dengan Trilogi Van Deventer. Agaknya, pandangan dan kritik Van Deventer ini berpengaruh besar terhadap kebijakan Pemerintah Belanda waktu itu, terbukti pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina (1890-1948) mengumumkan tentang kesejahteraan di pulau Jawa.

Dengan demikian, politik etis secara resmi di sahkan. Pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (*een eerschuld*) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Van deventer yang meliputi: (1)

---

<sup>15</sup> Tonny D. Widiastono, “Pendidikan dan Kesadaran Berbangsa”, Kompas.com, 20 Mei 2008.

irigasi (*irrigatie*), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian; (2) emigrasi (*emigratie*) yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi; dan (3) edukasi (*educatie*) yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan.<sup>16</sup>

Adapun untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut diperlukan dana, maka hutang pemerintah kolonial yang berjumlah mencapai sekitar 40 juta gulden diambil alih oleh pemerintah Belanda, sehingga Batavia dapat meningkatkan pengeluaran tanpa dibebani hutang lagi. Kondisi tersebut melahirkan gagasan untuk membuat pendidikan modern bagi bumiputra. Salah satu pencetus gagasan itu adalah Snouck Hurgronje yang mendirikan sekolah-sekolah rendah di Hindia Belanda yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sekolah inilah yang kemudian dikenal dengan nama Sekolah Van Deventer (*Van Deventer School*).

Sekolah ini mempunyai asrama bagi para siswa dengan lama pendidikan selama empat tahun. Sekolah ini diperuntukan bagi gadis-gadis bumi putera yang telah lulus Sekolah Kartini. Mereka yang telah lulus Sekolah Kartini akan ditampung di sekolah Van Deventer, sebuah yayasan pendidikan yang didirikan oleh Van Deventer pada 27 Juni 1917. Mata pelajaran yang diberikan adalah kerumah-tangga, jahit-menjahit, kerajinan tangan, dan ilmu pendidikan. Sekolah ini juga memberikan pendidikan untuk menjadi guru taman kanak-kanak.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern, op.cit.* 431.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 435.

Sekolah Van Deventer merupakan sekolah yang mendekati cita-cita Kartini, karena sekolah itu untuk menampung para gadis bangsawan lulusan ELS, di mana mereka diberi pelajaran untuk mengurus rumah tangga dan diberi keterampilan agar kelak mempunyai keterampilan sehingga dapat mencari nafkah sendiri.

Dengan diberlakukannya secara resmi politik etis, membawa angin segar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Arah umum pendidikan terpola menjadi dua jalur. Jalur pertama diharapkan dapat tercipta kebutuhan akan unsur elite (lapisan atas) dan juga tenaga terdidik yang bermutu tinggi. Jalur ini akan sangat diperlukan untuk tujuan pengembangan ekonomi dan industri di Hindia Belanda. Sementara, jalur kedua ialah untuk menciptakan tenaga menengah dan rendah yang berpendidikan.

Dalam sistem pendidikan ini, stratifikasi kelas tetap tidak berubah secara signifikan. Peraturan pemerintah kolonial tahun 1848 yang mengatur penggolongan kelas dalam masyarakat masih tetap berlaku hingga diubah menjadi tiga golongan di tahun 1920 (Golongan Eropa, Golongan Timur Asing, Golongan Bumiputera). Pendidikan di Hindia Belanda dalam dua dasawarsa pertama di abad XX menunjukkan perkembangan yang luar biasa pesat.

Pada saat itulah, pemerintah berusaha menerapkan sistem umum yang dapat mengakomodasi segala macam corak dan golongan yang ada di masyarakat. Namun, pendidikan waktu itu masih mengelompokkan masyarakat berdasarkan asal-usul suku, kebangsaan, dan kedudukan sosialnya. Dengan kata lain,

pendidikan yang dilakukan, masih bersifat sukuistik, tidak egaliter, dan dengan demikian masalah amat jauh dari cita-cita pengusung liberalisme.

Untuk sekolah rendah dengan pengantar berbahasa Belanda, terdapat pembagian bagi kalangan Eropa (*ELS–Europeesche Largeschool*), kalangan keturunan Cina dan Timur Asing (*HCS–Hollandsch Chineescheschool*), dan kalangan bumiputera yang anaknya bangsawan, tokoh-tokoh terkemuka, dan pegawai negeri (*HIS–Hollandsch Inlandscheschool*). Sementara itu, untuk sekolah rendah dengan pengantar bahasa daerah diselenggarakan *Inlandsche School* (Sekolah Bumiputera), *Tweede Klasse* (kelas dua), *Volkschool* (Sekolah Desa) dan *Vervolgschool* (Sekolah Lanjutan). Karena lamanya belajar bervariasi, maka dibuat juga *SchakelSchool* (sekolah peralihan).<sup>18</sup>

Untuk sekolah menengah, didirikan *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) atau sekolah dasar yang diperluas, yang diperuntukkan bagi kalangan bumiputera dan timur asing, dimana lulusannya dapat melanjutkan ke *Algemeene Middelbareschool* (AMS) alias Sekolah Menengah Umum. Sekolah lanjutan yang lain ialah *Hogere Burgerschool* (HBS) atau Sekolah Tinggi Warga Negara yang disediakan untuk golongan Eropa, bangsawan dari kalangan bumiputera, dan tokoh-tokoh terkemuka.

Pendidikan sekolah lanjutan juga mencakup didirikannya sekolah-sekolah kejuruan, yaitu *Ambachts Leergang* (sekolah pertukangan) yang berbahasa daerah, *Ambachts School* (sekolah pertukangan) yang berbahasa pengantar Belanda. Ada juga *Technisch Onderwijs* (sekolah teknik) yang mula-mula didirikan di Batavia

---

<sup>18</sup> Sumarso Moestoko, dkk. *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, Badan Penelitian dan Pengembangan, Depdikbud, Jakarta, 1979, hlm. 41

tahun 1906, *Handels Onderwijs* (Pendidikan Dagang) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan Eropa yang sedang berkembang pesat di Hindia-Belanda. Sementara itu, *Landbouw Onderwijs* (sekolah pertanian), selain untuk keperluan bumiputera yang bercorak agraris, juga untuk kebutuhan pengusaha-pengusaha Eropa yang memiliki banyak lahan perkebunan dan pertanian. Bentuk lain sekolah kejuruan yang didirikan ialah *Meisjes Valkonderwijs* (Pendidikan kejuruan kewanitaan), dan *Kweekschool* (Pendidikan Keguruan). *Kweekschool* sendiri sebetulnya sudah ada sejak tahun 1851 di Surakarta, namun sejak gencarnya politik etis, jumlahnya semakin bertambah banyak.<sup>19</sup>

Selain pendidikan formal yang disebutkan diatas, masih banyak terdapat bentuk-bentuk pendidikan lainnya berupa kursus-kursus yang diselenggarakan oleh pihak swasta, dalam hal ini khususnya oleh institusi yang bergerak di bidang keagamaan.

## 2. Sekolah Kartini

Van Deventer adalah tokoh politik yang menaruh simpati kepada orang Jawa, beliau mengagumi Kartini sebagai seorang perempuan bangsawan muda yang berhasil mempersatukan dirinya dalam unsur-unsur tinggi dari kebudayaan Timur dan Barat secara harmonis. Terdorong oleh rasa kagumnya terhadap Kartini, maka ia memberikan bantuan kepada orang Jawa yang tidak mampu bersekolah. Bantuan pendidikan kepada orang-orang Jawa yang tidak mampu bersekolah diberikan melalui Yayasan Candi (*Candi Stichting*) yang memberikan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 123.

kesempatan kepada pemuda-pemuda Jawa berbakat untuk melanjutkan pendidikannya di Belanda.

Di kalangan perempuan Jawa, lembaga pendidikan formal pertama yang penting adalah Sekolah Kartini, yang pertama berdiri tahun 1912. Sekolah Kartini adalah sekolah khusus untuk perempuan yang didirikan oleh Yayasan van Deventer di beberapa tempat untuk mendidik para siswa perempuan berdasarkan keinginan R.A. Kartini. Awalnya berdiri tahun 1912 di Semarang, kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon dan daerah lainnya.

Sekolah Kartini merupakan sebuah sekolah khusus perempuan dengan konsep pengajarannya yang disesuaikan dengan cita-cita Kartini. Di Surabaya Sekolah Kartini pertama kali didirikan pada 1918. Pendirian Sekolah Kartini di Surabaya sebagaimana di kota-kota besar lain di Jawa dimaksudkan tidak hanya untuk mendidik perempuan agar berpengetahuan luas, tetapi juga mendidik perempuan untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik.<sup>20</sup>

Setelah Kartini meninggal dunia pada tanggal 17 September 1904 keadaan perempuan Indonesia sedikit mengalami perubahan, yakni sudah banyak gadis yang bersekolah. Berkat perjuangannya munculah satu persatu sekolah untuk perempuan. Guna mendirikan sekolah-sekolah Kartini, pada tahun 1912 didirikan *Fonds Kartini* di Deen Haag. Pada tahun 1918 pemerintah mendirikan sekolah guru *Kweekschool* untuk guru perempuan di Salatiga. Guru-guru lulusan ini berhak mengajar di HIS, sekolah guru di Salatiga ini sudah mendekati sekolah

---

<sup>20</sup> Raden Adjeng Kartini, “*Opini omtrent de Kartini-School*”, dalam *Onderzoek naar de mindere welvaart der Inlandsche hevoling van de Indiaandcshe vreouw deel vii*, Batavia: Drukkrij “Papyrus”, 1914.

sekolah kejuruan, karena berorientasi dalam bidang pendidikan guru. Sekolah kaum perempuan bukan hanya untuk belajar membaca dan menulis, tetapi sudah dijuruskan dalam bidangnya masing-masing.

Pada tahun sama pemerintah mendirikan sekolah umum untuk perempuan dengan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar, akan diberi pengantar bahasa Belanda sebagai mata pelajaran. Pada tahun 1921 pemerintah membuka sekolah normal untuk pendidikan guru yang tingkatnya lebih rendah daripada *Kweekschool*.<sup>21</sup> Setelah berdirinya Sekolah Kartini di Semarang kemudian muncul sekolah lain di beberapa daerah lain seperti di Jakarta (1913), Bogor (1913), Madiun (1914) dan Malang (1916). Sekolah tersebut bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda, sedangkan bahasa pengantar sekolah-sekolah yang ada di Pekalongan (1917), Cirebon (1916), Indramayu (1918), Rembang dan Surabaya adalah bahasa Daerah.<sup>22</sup> Sekolah tersebut didirikan dengan perhimpunan Kartini atau *Kartini Schoolvereniging*.

Dengan berdirinya sekolah-sekolah itu, pendidikan perempuan Indonesia sedikit lebih maju bila dibandingkan pada masa Kartini. Perempuan Indonesia tidak lagi diam di rumah, tetapi sudah dapat bersekolah baik sekolah rendah, menengah, tinggi bahkan ada yang menjadi dokter, hakim dan lain sebagainya. Berbeda dengan masa Kartini, perempuan hanya diam di rumah, tidak boleh bersekolah, harus tunduk terhadap aturan adat dan tidak boleh mempunyai cita-cita pemberdaaan diri. Berkat gagasan Kartini mengenai pendidikan kaum

---

<sup>21</sup> Siti Soendari Soeroto, *op. cit*, hlm. 343.

<sup>22</sup> Harsja Bachtiar dkk, *op. cit*, hlm. 39.

perempuan inilah kemudian muncul kesadaran diri dari pemerintah maupun pihak swasta lain untuk mendirikan sekolah bagi kaum perempuan.

Selain penyelenggaraan pendidikan di lembaga formal, seperti Sekolah Kartini, terdapat pula kursus-kursus keperempuanan yang mengajarkan kecakapan perempuan, seperti memasak, menjahit, merenda, perawatan ibu pasca-melahirkan, dan perawatan anak-anak. Pelatihan tersebut juga dilakukan oleh organisasi-organisasi sosial.<sup>23</sup> Terdapat pula perhimpunan kaum ibu yang memiliki program tentang pemberantasan buta huruf atau analfabetisme. Mereka antara lain dikelola oleh sekolahan kaum ibu, Poeteri Boedi Sedjati yang memiliki *Frobelkweek-school*, Aisyiyah, maupun PPII yang secara umum mengajarkan perempuan keterampilan jahit-menjahit, memasak, maupun menenun. Tujuannya agar siswa yang lulus dari sekolah *ein diploma* ini tidak hanya mendapatkan pelajaran umum, tetapi juga pendidikan keputrian.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Pringgodigdo, *op. cit.*, hlm. 20.

<sup>24</sup> R. Soetomo, *Kenang-kenangan Beberapa Poengoetan Kisah Penghidoepan Orang jang Bersangkutan dengan Penghidoepan Diri Saia*, hlm. 117.